

RESISTENSI DEMOKRASI INDONESIA DALAM RUANG CITIZEN JOURNALISM "KOMPASIANA"

Sulkhan Chakim

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstract: The result of this study is that the education of citizens through *Kompasiana* attitude in the discourse of resistance democracy that being constructed through citizen political, governmental politics, economics politics, and the politics of parliament. The process of democratic resistance represented by way of siding with the government against the people, which involves several social agencies as executing, handler and the beneficiaries. Democratic discourse and spawned debate the pros and cons in the public sphere who gave birth to the idea and its spread into the community that is imagined in the democratic spectrum. In its intersubjective relation, the decision maker is the president as the socio-political-economic central compared with his assistants.

Keywords: Resistance, Democracy, and Citizen Journalism.

Abstrak: Hasil penelitian ini adalah, Edukasi warga melalui sikap kompasiana dalam wacana resistensi demokrasi dikonstruksikan melalui politik warga, politik pemerintahan, dan politik ekonomi, serta politik parlemen. Proses resistensi demokrasi direpresentasikan dengan cara pemihakan pemerintah terhadap masyarakat, yang melibatkan beberapa agen-agen sosial sebagai pelaksana, pengendali dan pengambil manfaat. Wacana demokrasi melahirkan perdebatan dan pro dan kontra dalam *public sphere* yang melahirkan gagasan dan penyebarannya menjadi komunitas yang diimajinasikan dalam spectrum demokrasi. Dalam relasi interubjeknya pengambil keputusannya adalah presiden sebagai posisi sosial-politik-ekonomi yang sentral dibandingkan dengan para pembantunya.

Kata Kunci: Resistensi, Demokrasi, dan Citizen Journalism.

A. PENDAHULUAN

Kajian ini sebagai upaya kritis terhadap posisi *audiences* di media jurnalisme warga dalam jaringan internet dan berdampak terhadap media tradisional. Dalam konteks ini, ada beberapa argumentasi, yaitu *Pertama*, karena media baru atau *citizen journalism online* warga tidak hanya sebagai konsumen seperti posisi yang selama ini

terjadi di media tradisional, melainkan juga warga memposisikan diri sebagai instrumen produksi hingga mendistribusikan konten; dan 'membangun' konten. *Kedua*, produksi konten dan penyebarannya di media jurnalis warga tersebut sering dipahami sebagai aktifitas hiburan dan tanpa memiliki motif berupa latar belakang ekonomi-politik.

Pola komunikasi terjadi tidak lagi dari sumber tunggal terdesiminasi ke khalayak bersifat pasif, dan berada dalam posisi terisolasi¹, namun lebih dinamis, tidak terpusat, sampai khalayak terlibat. Dan merupakan konstruksi sebuah media komunikasi dan informasi, bahkan memberikan perhatian hak tentang peran politis dan ekonomi serta proses formasi publik (*public policy formation*).²

Berangkat dari konteks ruang publik atau *public sphere* yang diproduksi oleh media massa, seolah-olah menjadi kekuasaan institusi media, tetapi sesungguhnya ruang *citizen journalism* memberikan ruang debat dan bahkan kontestasi warga terhadap issue-issue yang ada. Oleh karena itu, kajian ini mempertanyakan bagaimana proses-proses wacana resistensi kuasa warga tentang demokratisasi di Indonesia melalui Kompasiana dan bagaimana hubungan intersubyektif dalam *public sphere-citizen journalism* memproduksi entitas baru?

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji peta wacana dalam topik pilihan Kompasiana. Peta wacana tersebut dipetakan menjadi empat tema besar, yaitu politik warga (*political citizens*), politik pemerintahan (*political government of policy*), politik parlemen, dan ekonomi politik. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang digunakan, adalah pendekatan resistensi kontingensi yang dibangun oleh media sosial. Argumen ini adalah berasumsi bahwa teknologi informasi berperan/memberikan kontribusi pada perkembangan komunikasi politik, khususnya berpengaruh pada deliberasi demokrasi dan pembuatan keputusan yang baik³. Kerangka kerja pendekatan ini menempatkan peta-peta wacana sebagai subjek yang dianalisis pada tataran konflik dan pendukungnya. Selanjutnya praktik wacana kritis ini akan dibahas melalui tiga tahapan, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi atau yang sering disebut dengan praktik sosio-kultural.

1. Praktik wacana politik warga

Kompasiana sebagai media baru atau media sosial yang berbasis jurnalisme warga memberikan ruang selebar-lebarnya terhadap warga untuk memberikan gagasan ataupun peristiwa aktual. Warga sebagai *audience* yang aktif dan kritis mampu memberikan kontribusi pada produksi isi dengan tanpa motif ekonomi. Kesadaran dan ketulusan warga untuk berbagi dan berhubungan satu sama lain. Proses inilah secara terus menerus menjadi sebuah komunitas yang dibayangkan, walaupun dalam dunia maya. Dalam konteks kehidupan demokrasi pada era Jokowi-Jusuf Kalla atau era kabinet kerja, wacana demokrasi menjadi penting untuk melihat realitas keinginan warga-bangsa dalam sebuah wacana dan juga melihat bagaimana negara hadir di tengah-tengah kehidupan berdemokrasi.

Kekhawatiran dan kecurigaan ini mengundang resisten bagi pelaksana program yang didanai oleh dana desa. Meminjam istilah yang digunakan oleh Foucault⁴ merupakan instrumen kontrol sosial. Dalam hal ini ketiga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), KPK, kejaksaan dan kepolisian, serta media massa tersebut sebagai alat kontrol pelaksanaan dana desa di seluruh Indonesia. Kontrol sosial merupakan salah satu praktik demokrasi baik di wilayah parlemen dan pemerintahan pusat maupun di daerah.

Instrumen kontrol sosial atas program pedesaan dapat dijadikan strategi oleh ketiga lembaga tersebut. Satu sisi bagi lembaga media massa merupakan lembaga yang bekerja mengopinasikan penggunaan dana desa yang sangat fantastis dan rawan penyelewengan di tingkat daerah. Penyebaran informasi dengan jangkauan dan proses difusi ini dapat berpengaruh pada kognisi sosial atas penggunaan dana desa/APBN. Artinya pengetahuan aturan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBN ini berpengaruh pada tekanan-tekanan bagi pelaksana program. Apa yang diwacanakan oleh Kompasiana yaitu bagaimana caranya dana desa selamat? Dengan bentuk kalimat tanya ini, jika dipahami sebagai praktik sosial. Bourdieu memberikan implikasi pada pertarungan politis. Artinya terdapat tarik menarik kepentingan atas sumber dana yang ada, tentunya tidak lepas dari mereka yang duduk di lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di tingkat daerah adalah DPRD II yang terdiri dari berbagai fraksi kepartaian yang secara non formal akan berpengaruh pada perjuangan masing-masing partai untuk memperoleh/mendapatkan simpati rakyat.

Simpati rakyat atas agen-agen yang ada di partai tersebut akan relevan dengan trio konsep Boudieu, sejauh mana kepentingan agen untuk mengumpulkan modalitas dalam ranah publik untuk merealisasikan kepentingannya yang dalam hal ini disebut dengan modal simbolik⁵. Oleh karena itu, setiap individu dalam semua partai berusaha untuk mengumpulkan simpati, perhatian, dan kepercayaan masyarakat pemilih dan menjadi investasi jangka panjang atau yang disebut *cultural power*.⁶ Kekuasaan yang diperoleh atau dibangun melalui interaksi praktik-praktik sosial dalam waktu yang relatif lama.

Dalam konteks ini, Kompasiana sebagai media warga terkait dengan wacana tentang "penyelamatan dana desa" ruang interaksi yang diberikan oleh komunitas dalam memberikan pendapat dan respon atas wacana tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa Kompasiana telah melakukan sosialisasi ideologis pada penyadaran semua komponen untuk mengawal program dana desa. Di sisi lain kekuatan politis menunjuk pada pengawasan internal, eksternal, dan media atas pelaksanaan program yang diundangkannya.

2. Praktik wacana politik pemerintahan

Dalam wacana politik pemerintahan yang dibangun oleh Kompasiana merilis, Jokowi, Dibalik Konflik Yusuf Kalla-Rizal Ramli". Subtansi wacana ini Konflik Jokowi-JK di atas menunjukkan perbedaan pandangan di tingkat pejabat pembantu presiden. Hal ini dilansir di ruang terbuka melalui berbagai media. Dalam konteks ini, banyak pihak yang menyayangkan tidak ada sistem pengendalian komunikasi dalam pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, konflik tersebut memberikan ilustrasi, bahwa beberapa kepentingan sedang memainkan peran yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Kompetisi pemilik modal secara individual membuat kepentingan khusus yang tampak sebagai kepentingan umum pada level negara, Hickel (1975: 151), "*resides the actual relevance of bourgeois fractioning.*"

3. Praktik Wacana Ekonomi Politik

Headline Kompasiana tentang ekonomi politik menempatkan dominasi asing dalam sebuah negara yang berdaulat, seperti wacana ketika cengkeraman asing menguasai negara. Banyak yang mempertanyakan, mengapa hal ini dapat terjadi? Kekuasaan demokrasi adalah mengkalkulasi kekuatan, dan beberapa kelompok adalah

yang secara integral pada beberapa teknologi yang memberikan efek bagi demokrasi sebagai suatu serangkaian partikular mekanisme peraturan⁷.

Hal ini juga tidak lepas dari beberapa gebrakan tentang peninjauan ulang ratusan aturan untuk direvisi dan upaya kemudahan izin proyek-proyek negara. Strategi pemerintahan Jokowi-JK untuk menanamkan kepercayaan penanaman modal asing ini merupakan upaya pemberian hak-hak untuk bergantung dan pertukaran properti, privasi, perlindungan yang sama di bawah hukum, menjadi proses kewajiban.⁸ Apa yang dilakukan presiden Jokowi ini dapat menjadi argumentasi tentang kesuksesan politik luar negeri bukan sebagai politik identitas, tetapi bagaimana sesungguhnya publik melihat sebagai politik konstruksi⁹. Media mengkonstruksikan bahwa usaha luar biasa presiden Jokowi sukses membangun kepercayaan di tingkat Asia-Afrika. Kesuksesan ini menjadi modal politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri.

Kesuksesan ini menjadi modal politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat digunakan untuk membangun legitimasi di tingkat elit negara, otoritas dan memperkuat kekuasaan presiden atau yang disebut dengan "...to consolidate the ruling elite's political legitimacy".¹⁰ Menurut Anderson¹¹ perangkat nasionalisme atau yang disebut "*official nationalism*" dikonstruksikan melalui formasi kultural dan artefak-artefak yang berupa narasi ideologis, musik, sastra, drama, film, bendera, lagu kebangsaan dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan ideologi dan politik suatu negara.

4. Praktik Wacana Politik Parlemen

Fakta publik dalam ruang sosial akan menjadi beban pemahaman atau sering juga disebut kegelisahan warga bangsa atas perilaku para elit pemerintahan dan parlemen. Beberapa karakteristik negara adidaya USA menghegemoni dunia, salah satunya negara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang didominasinya. Hal ini dibuktikan oleh situasi ekonomi Indonesia yang mudah dipengaruhinya, salah satunya adalah pelemahan rupiah yang sangat menakutkan semua pihak, khususnya kalangan industri berbasis impor. Media memprovokasi reaksi negatif kondisi tersebut. Himbauan presiden tentang penggunaan rupiah bagi kalangan usaha juga tidak mempan bagi penguatan mata uang rupiah, usaha membangun nasionalisme atau yang sering disebut *official nationalism*¹² dijadikan isyuenya tidak berefek positif.

C. KESIMPULAN

Kompasiana sebagai media baru (*new media*) dan dijadikan sebagai jurnalisme warga dengan memberikan ruang warga sebagai jurnalis dan sekaligus sesuai dengan karakteristik sebagai *citizen journalist*. Sebagaimana Kompasiana mendukung warga melalui sikap Kompasiana melalui wacana resistensi kuasa tentang demokrasi yang dikonstruksikan oleh Kompasiana.com dalam empat peta wacana yaitu, politik warga, politik pemerintahan, dan politik ekonomi, serta politik parlemen. Proses resistensi politik warga dalam berdemokrasi berangkat dari isu pokok tentang pemihakan pemerintah terhadap masyarakat, yang mana wacana ini melibatkan beberapa agen-agen sosial sebagai pelaksana, pengendali dan pengambil manfaat.

Pesan-pesan yang diwacanakan oleh Kompasiana melahirkan perdebatan dan pro dan kontra dalam *public sphere* yang melahirkan gagasan dan penyebarannya menjadi komunitas yang diimajinasikan dalam spectrum politik warga, politik pemerintahan, politik parlemen dan politik ekonomi. Kekuasaan demokrasi adalah mengkalkulasi kekuatan, dan beberapa kelompok yang secara integral pada beberapa teknologi yang memberikan efek bagi demokrasi sebagai suatu serangkaian mekanisme kekuasaan. Dalam relasi interubjeknya pengambil keputusannya adalah presiden sebagai posisi sosial-politik-ekonomi yang sentral dibandingkan dengan para pembantunya.

ENDNOTES

¹ Levy, P. 2001. *Cyberculture*. Minnesota: University of Minnesota Press, h. 223

² Gandy Jr. Oscar H., 1992. *The Political Economy Approach: A Critical Challenge*, An Elgar Reference Collection, h. 23.

³ Philippe J. Maarek and Gadi W., *Political Communication in A New Era: A Cross-national Perspective*, London: Routledge, h. 42.

⁴ M. Foucault (2002) *Archaeology...*

⁵ Pierre Bourdieu, 1991. *Language and Symbolic Power*, terj. Gino Raymond and Matthew Adamson, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

⁶ Marry Talbot, 2007. *Media Discourse : Representation and Interaction*, Edernburgh University Press:Edernburgh, h. 15.

⁷ Nikolas Rose (1999) *The Powers of Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press: 200.

⁸ Ibid.

⁹ Gary D. Rawnsley & Ming-Yeh T. Rawnsley, 2003. *Political Communications in Greater China: The Constructions and Reflection of Identity*, London: RoudledgeCurzo, h. 62

¹⁰ Ibid.

¹¹ Benedict Anderson, 1991. *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, h.110.

¹² B. Anderson, 1991. *Imagined Communities*,... h. 110.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre.,1990. *In Other Words: Essays Towards a Reflective Sociology*, Stanford: Stanford University Press.
- Levy, P. 2001. *Cyberculture*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Gandy Jr. Oscar H., 1992. *The Political Economy Approach: A Critical Challenge*, An Elgar Reference Collection.
- Fairclough, Norman., 2001. *Language and Power*, England: Pearson Education Limited.
- Hardiman., Budi F. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nugroho, Heru., 2004. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Rose, Nikolas. 1999. *The Powers of Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press.